

DPRD Konsultasi ke BPK-RI

Pontianak, BERKAT.

Ketua DPRD Kota Pontianak Hartono Azas menganggap penting konsultasi DPRD Kota Pontianak dalam rangka membahas laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar atas laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak tahun anggaran 2010, Rabu kemarin.

"Tentunya kita ingin mempelajari lebih lanjut laporan BPK terkait hasil keuangan kita, di mana wajar dengan pengecualian tidak musti diterima saja tetapi harus ada koresi lebih lanjut, tentang apa tindakan yang harus dilakukan agar kita bisa memperoleh status wajar tanpa pengecualian dari BPK-RI ini," katanya.

Ia menuturkan, banyak yang sudah

diusulkan BPK-RI terkait perbaikan laporan keuangan pemerintah Kota Pontianak. Sebelumnya BPK-RI mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja), dan pembentukan Standar Operasional Procedur (SOP) di SKPD tertentu.

"Banyak yang menjadi catatan oleh BPK ini. Nah itu yang ingin kita pelajari, makanya sangat penting untuk berkonsultasi dengan BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil ini, baiknya seperti apa, semacam konsultasilah," ujarnya.



HARTONO AZAS

Tidak hanya itu perbaikan yang dituntut BPK-RI tetapi juga yang menjadi sorotan penyertaan modal yang harus disertai dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal, dan ada beberapa hal tertib administrasi pengelolaan daerah, hingga aset pembangunan mengenai ganti rugi yang harus dibenahi dengan legalitas yang ada.

"Dan jujur saja masalah aset menjadi catatan bagi kami untuk diperbaiki, mengingat permasalahan aset menjadi catatan pengecualian dari BPK-RI yang kerap selalu ada setiap

tahunnya dalam catatan BPK ini," ucapnya. Sementara menurut Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Arif Joni Prasetyo, sangat penting karena di sana pihaknya akan mendapat penjelasan mengenai temuan-temuan BPK-RI ini.

"Nantinya temuan itu kita dalam, baru kita gelar rapat konsultasi guna mendapat penjelasan dari LHP ini, kita nanti," ujarnya. Rapat konsultasi ini nantinya akan mengundang kalangan pemerintah, terutama SKPD yang bermasalah.

"Kita meminta penjelasan dari LHP, setelah itu kita undang penanggung jawab LHP pemerintah dan SKPD nya, kemudian kita konfrontir hasil LHP. Setelah itu masuk masa evaluasi dengan DPRD memberikan saran pendapat untuk rekomendasi dan perbaikan lebih baik," ucapnya. (wti)